



PUTUSAN
Nomor 3127/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5207/PJ/

2018, tanggal 17 Desember 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

PT ANTA TIRTA KARISMA, beralamat di Ruko Green Garden Blok Z.4 No.21 RT.005 RW.008, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112756.16/2014/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 25 September 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa besarnya SKPKB PPN Tahun 2014 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh KPP Madya Jakarta Barat adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3127/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Menurut	
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak		
	a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:		
	a.1. Ekspor	1.998.440.183,00	1.998.440.183,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	3.842.254.330,00	3.842.254.330,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	0,00	
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	74.582.500,00	74.582.500,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	5.915.277.013,00	5.915.277.013,00
	b Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00	
	c Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b)	5.915.277.013,00	5.915.277.013,00
	d Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dan Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan		
	d.1. Impor BKP	0,00	
	d.2. Pemanfaatan BKP Tdk Berwujud dr Luar Daerah Pabean	0,00	
	d.3. Pemanfaatan JKP dan Luar Daerah Pabean	0,00	
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00	
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	
	d.6. Penyerahan atas aktiva y.m.t.s. tdk untuk diperjualbelikan	0,00	
	d.7. Jumlah	0,00	
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri (1.a.2/1.d.7)	384.225.436,00	384.225.436,00
	b Dikurangi:		
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	570.837.486,00	557.264.900,00
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0,00	
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	
	b.5. Lain-lain	0,00	
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	570.837.486,00	557.264.900,00
	c Diperhitungkan:		
	c.1. SKPPKP	0,00	
	d Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	570.837.486,00	557.264.900,00
	e Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(186.612.050,00)	(173.039.520,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:		
	a Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	186.612.050,00	186.612.050,00
	b Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0,00	
	c. Jumlah (a+b)	186.612.050,00	186.612.050,00
4	Jumlah PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	0,00	13.572.500,00
5	Sanksi Administrasi :		
	a Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3127/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00	13.572.52
c Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00	
d Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00	
e Kenaikan Pasal 170 (5) KUP	0,00	
f Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00	
g Jumlah (a+b+c+d+e+f)	0,00	13.572.52
6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	0,00	27.145.04

Bahwa perbedaan perhitungan tersebut disebabkan adanya koreksi pengurangan pajak masukan dikarenakan faktur tersebut tidak tepat dikreditkan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 7 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112756.16/2014/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 25 September 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00013/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 13 Februari 2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor: 00002/207/14/039/16 tanggal 21 Januari 2016, atas nama PT Anta Tirta Karisma, NPWP 03.206.561.7-039.000, beralamat di Ruko Green Garden Blok Z.4 No.21 RT.005 RW.008, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

DPP PPN	Rp	5.915.277.013,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	384.225.436,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	562.473.886,00
PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	(178.248.453,00)
Kelebihan yang sudah dikompensasikan/ direstitusi	Rp	186.612.050,00
PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar	Rp	8.363.597,00
Sanksi Administrasi:	Rp	
- Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	0,00
- Pasal 13 (3) UU KUP	Rp	8.363.597,00
PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	Rp	16.727.194,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3127/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Januari 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112756.16/2014/PP/M.XXA Tahun 2018 tanggal 25 September 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112756.16/2014/PP/M.XXA Tahun 2018 tanggal 25 September 2018 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 00013/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 13 Februari 2017, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3127/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor: 00002/207/14/039/16 tanggal 21 Januari 2016, atas nama PT Anta Tirta Karisma, NPWP 03.206.561.7-039.000, beralamat di Ruko Green Garden Blok Z.4 No.21 RT.005 RW.008, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11520, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00013/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 13 Februari 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor: 00002/207/14/039/16 tanggal 21 Januari 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 03.206.561.7-039.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp16.727.194,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Pajak Januari 2014 Sebesar Rp5.208.925,00; yang tidak

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3127/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan uji bukti oleh para pihak dihadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Januari 2014 Sebesar Rp5.208.925,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena Faktur Pajak Masukan tersebut telah dibayar PPN-nya oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali kepada PT Siegwark Indonesia dan telah dilakukan pembetulan oleh lawan transaksi, PT Siegwark Indonesia, dengan mencantumkan NPWP Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, tanggal 29 Januari 2018, sehingga Majelis berpendapat Pajak Masukan *a quo* dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (8) huruf f dan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3127/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf i serta Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp16.727.194,00; dengan perincian sebagai berikut:

DPP PPN	Rp	5.915.277.013,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	384.225.436,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	562.473.886,00
PPN Kurang (Lebih) Bayar	Rp	(178.248.453,00)
Kelebihan yang sudah dikompensasikan/direstitusi	Rp	186.612.050,00
PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar	Rp	8.363.597,00
Sanksi Administrasi:	Rp	
- Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	0,00
- Pasal 13 (3) UU KUP	Rp	8.363.597,00
PPN Yang Masih Harus (Lebih) Dibayar	Rp	16.727.194,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019,

oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung

Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

bersama-

sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

dan

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi,

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung

sebagai Anggota, dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim

Anggota

tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa

dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3127/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3127/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)